



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIF PURNOMO
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 685992

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.618.625.000

1. Tanah Seluas 125 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 184 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , WARISAN Rp. 600.000.000
3. Tanah Seluas 2.347 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, WARISAN Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 258 m2/220 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
5. Tanah Seluas 480 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000
6. Tanah Seluas 623 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
7. Tanah Seluas 663 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 248.625.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 546.000.000

1. MOTOR, HONDA NF 125 TD M/T Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA NC12A1CF A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000



3. MOBIL, DAIHATSU TARUNA CX1500 Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. MOTOR, HONDA X1H02N32L1 A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. MOTOR, HONDA X1H02N32L1 A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
6. MOBIL, TOYOTA INOVA HYBRID V Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 490.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	115.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	16.200.459
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.295.825.459
III. HUTANG	Rp.	800.500.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.495.325.459

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.